



Manajemen komunikasi risiko terhadap bencana kebakaran gedung

Rahadian Andrianto¹, Henni Gusfa², Yoyoh Hereyah³

^{1,2,3}Universitas Mercu Buana

andri.fire113@gmail.com, henni.gusfa@mercubuana.ac.id, yoyoh.hereyah@mercubuana.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

15 Desember 2023

Disetujui :

20 Desember 2023

Dipublikasikan :

25 Januari 2024

ABSTRAK

Bahaya kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat di prediksi kapan datangnya. Kerugian harta benda maupun nyawa seakan ada didepan mata. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mitigasi risiko kebakaran, kesiapsiagaan, respon dan antisipasi kejadian kembali. Proses manajemen komunikasi risiko kepada pengelola dan penghuni gedung dapat mengurangi kerugian baik harta benda maupun jiwa dan mengantisipasi bencana kebaran terjadi lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi risiko berbasis bangunan tinggi di Provinsi Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, paradigma konstruktivis teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan pada saat pra penelitian, selama penelitian dan pasca penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumen. Subjek penelitian adalah pengelola gedung dan Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen komunikasi risiko dapat menjadi kunci dalam menghadapi bahaya bencana kebakaran, kemudian diperlukan strategi dalam penyampain pesan komunikasi risiko kebakaran pada pengelola gedung.

Kata kunci: Keterbatasan dan keamanan, pers Komunikasi risiko; Manajemen Komunikasi Risiko; Tahapan Mengelola Risiko

ABSTRACT

Fire is a disaster that cannot be predicted when it will come. Loss of property and life seemed to be right before our eyes. Communication is the key to success in mitigating fire risk, preparedness, response and anticipation of re-occurrence. The process of risk communication management to building managers and occupants can reduce losses of both property and life and anticipate fire disasters occurring again. This research aims to analyze risk communication strategies based on tall buildings in Jakarta Province. This research uses a qualitative descriptive method, the technical constructivist paradigm of data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions during pre-research, during research and post-research. Data collection was carried out by conducting observations, interviews and documents. The research subjects were building managers and the DKI Jakarta Province Disgulkarmat. The results of this research are that risk communication management can be the key in dealing with the danger of fire disasters, then a strategy is needed in conveying fire risk communication messages to building managers.

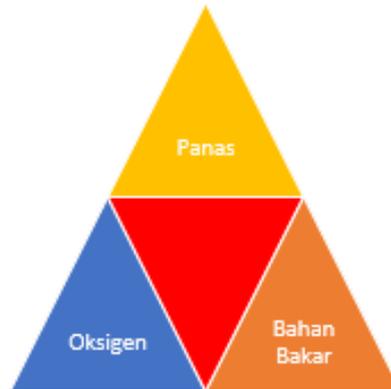
Keywords: Limitations and security, risk Communication press; Risk Communication Management; Stages of Managing Risk



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia khususnya di DKI Jakarta menarik minat investor untuk melakukan investasi dengan membangun gedung tinggi dengan berbagai fungsi, seperti: perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan lain- lain. Bahaya kebakaran merupakan bahaya yang sangat serius karena akibat yang ditimbulkannya sangat besar dan dapat berupa kerugian materiil dan moril bahkan hilangnya nyawa manusia. Pengertian kebakaran menurut (Adzmin, 2013) adalah setiap nyala api, besar atau kecil, yang terjadi pada tempat, situasi, atau waktu yang tidak diinginkan, merugikan dan umumnya sulit dikendalikan. Nyala api disebabkan oleh berbagai elemen, termasuk panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. biasa disebut segitiga api.



Gambar 1 Segitiga Api

Penyebab kebakaran secara umum disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor manusia, faktor teknis, dan faktor alam. Resiko terjadinya kebakaran dan ledakan bisa terjadi kapan saja, dimana saja, kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Jumlah bencana kebakaran gedung memang tidak sebanyak pemukiman, hal ini menjadikan sebuah evaluasi bagi Disgulkarmat dalam menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Apalagi beberapa kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa. Tahun 2021 jumlah kejadian kebakaran bangunan gedung berjumlah 8 kejadian dengan korban masyarakat luka- luka sebanyak 11 orang dan meninggal 2 orang.

Menurut data diatas dengan adanya korban jiwa meninggal, bahwa Kebakaran harus dikelola dan direncanakan dengan baik, dimulai dengan pencegahan, respons, dan pemulihan kebakaran, karena masyarakat cenderung hanya bereaksi setelah kebakaran terjadi dan risiko kebakaran sering diabaikan, diabaikan, dan tidak mendapat perhatian dari manajemen. sistem. Pengelolaan kebakaran lebih dari sekedar menyediakan infrastruktur atau melakukan kegiatan pencegahan kebakaran. Namun terdapat hal yang lebih penting, yaitu bagaimana mengelola suatu komunikasi yang menitikberatkan kepada risiko yang akan dihadapi apabila terjadi kebakaran, bentuk dari itu komunikasi itu berupa pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat adalah Menimbulkan rasa aman dan nyaman terhadap resiko kebakaran, oleh sebab itu Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayan secara profesional kepada Masyarakat DKI Jakarta dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Pencegahan kebakaran merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara masiv oleh Disgulkarmat agar menekan volume kejadian kebakaran dan kerugian dapat diminimalisir. Sesuai data Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki kurang lebih 1030 bangunan Gedung tinggi diatas delapan lantai dimana bangunan tersebut beragam fungsi, seperti Apartement, Bisnis, Perkantoran, Gedung Umum, Hotel, Mix Use, Hunian Lain, Rumah Susun, Pendidikan dan Pusat Perdagangan.

Tabel 1 Data Bangunan Gedung Sesuai Fungsinya (Data Disgulkarmat 2021)

No	Wilayah	Apt	Bisnis Lain	GD Umum	Ht l	Hun an	Ks ht n	Mix Use	Pend idika n	Kant ot	Pst Prdg an	Rus un	To tal	Sesuai Pergu b	Tdk Sesuai Pergu b
1	Jakarta Pusat	58	8	1	49	1	4	1	5	148	11	3	289	176	113
2	Jakarta Utara	41	2	3	9	2	3	0	1	18	2	3	84	63	21
3	Jakarta Barat	55	10	0	14	1	3	1	7	38	8	9	146	112	34
4	Jakarta Selatan	131	10	0	40	11	6	0	4	223	10	5	440	346	94
5	Jakarta Timur	11	2	3	5	3	4	0	3	22	2	16	71	42	29
	Jmlh	296	32	7	117	18	20	2	20	449	33	36	1030	739	291

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan pada Bab III MKKG Bagian Kesatu Pembentukan pasal 5 berbunyi : (1) Pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG, (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, (3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.

Manajemen komunikasi risiko yang saat ini dilakukan oleh Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta masih belum berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, lebih kepada perencanaan saja, sedangkan tahapan lain seperti pelaksanaan dan monitoring evaluasi masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 yang masih terdapat bangunan gedung yang belum memenuhi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang MKKG dan MKKL. Manajemen komunikasi risiko bencana kebakaran terhadap pemilik/pengelola gedung harus dilakukan secara tepat, pendekatan melalui komunikasi persuasive terhadap pemilik/pengelola gedung yang masing belum menjalankan amanat peraturan gubernur terus ditingkatkan melalui tahapan- tahapan yang tersusun melalui manajemen komunikasi risiko agar bencana kebakaran gedung dapat diatasi sebelum membesar. Untuk memperbaiki semua ini diperlukan keterlibatan semua stakeholder baik internal maupun eksternal, dimana utamanya adalah bagaimana peran dari pihak pemilik, pengelola dan penghuni bangunan terhadap keselamatan jiwa dari bencana dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pihak internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan perlu menerapkan manajemen organisasi bangunan gedung dalam mengkomunikasikan risiko kebakaran kepada para penghuninya, baik itu penghuni tetap maupun penghuni tidak tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradig konstruktivisme. Menurut (Creswell, 2014), paradig konstruktivisme sosial individu- individu berusaha memaknai makna- makna kejadian atau peristiwa social. Penerapan manajemen komunikasi risiko dimaknai oleh para pengelola gedung sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Objek dari penelitian ini adalah manajemen komunikasi risiko yang dilakukan oleh Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta terhadap bencana kebakaran gedung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Studi Kasus, Menurut (Yin, 2014) mendefinisikan kasus sebagai fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Data primer didapat dari wawancara, ini dilakukan dengan mewawarai Kepala Bidang Pencegahan, Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kepala Seksi Pencegahan Sudin Jakarta Timur dan Selatan. Sedangkan data diperoleh dengan cara membaca, mengamati dan mempelajari dari media lain yang bersumber literature, buku- buku serta dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen komunikasi risiko terhadap bencana kebakaran gedung merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta. risiko perlu diketahui oleh para pengelola dan penghuni gedung dengan strategi komunikasi yang sesuai, hal ini dapat menumbuhkan peran serta pengelola dan penghuni gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta dapat meminimalisir kerugian baik harta maupun jiwa.

Analisis peran pengelola gedung dalam pencegahan kebakaran

Peran pemiliki, pengguna dan/atau pengelola gedung yang didalamnya terdapat MKKG sebagai pemangku kepentingan Disgulkarmat adalah sebagai kepanjangan tangan Disgulkarmat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, eksistensinya sangat dirasakan oleh Disgulkarmat mereka adalah garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran awal sebelum datang petugas pemadam kebakaran. Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan Saepuloh mengatakan:

“kesiapsiagaan si penghuni dan petugas ya harus dibentuk salah satunya adalah organisasi tanggap darurat , MKKG ya pak, ada ketua MKKG, regu pemadam, regu evakuasi, regu komunikasi dan teknisnya Nah di situ harus di harus disusun setiap organisasi itu dan juga harus ditunjuk Siapa orangnya langsung ditetapkan setelah ditetapkan Salah satu kewajiban adalah memberikan pengetahuan dan tampilan kepada tim yang sudah ditunjuk itu mereka agar supaya tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya itu dia tugas regu pemadam kondisi darurat darurat kebakaran ya tim evakuasi itu harus dipahami itu bentuk komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh si pengelola gedung terhadap sistem tanggap darurat”

Dalam melakukan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, informan menyebutkan bahwa “berkewajiban untuk menjamin keselamatan, khususnya keselamatan penghuni gedung bahkan asetnya, selain itu juga hak gedung adalah mendapatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan oleh petugas pemadam kebakaran”. Maka dari itu para pengelola gedung adalah stakeholder yang sangat membantu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penghuni gedung dari bahaya kebakaran. Menurut Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Deni Andreas mengatakan:

“kegiatan terkait gedung lebih diatur oleh perizinan perizinan itu harus dilakukan Damkar adalah mengeluarkan rekomendasi teknis dalam penerbitan rekomendasi teknis itu kan harus didasarkan hasil observasi hasil pemeriksaan inspeksi didalam inspeksi ini aspeknya antara lain yang menginclude masalah komunikasi adalah di MKKG Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung itu namanya manajemen itu itu kan continual improvement pdca plan do check action perencanaannya Bagaimana gedung itu yang memahami tadi bahaya dan resiko gedung adalah orang-orang di gedung yang tahu isinya apa fungsinya apa karakter orangnya seperti apa ya”

Analisis Program Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengelola Risiko Kebakaran di Gedung.

a. Pengawasan pada masa konstruksi

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memberikan masukan teknis kepada mengenai sarana penyelamatan, akses pemadam, konsep proteksi pasif dan aktif, serta konsep manajemen penyelamatan. Pelaksanaan program ini dalam rangka pengawasan pra pembangunan sebuah bangunan gedung dan ini merupakan peran pertama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memberikan informasi dan edukasi pencegahan kebakaran, sehingga kewajiban gedung harus memenuhi kewajiban rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Deni andreas selaku Seksi Pencegahan Sudin Jakarta Selatan mengatakan :

“terkait analisa bahaya dan risiko isinya apa fungsinya apa huniannya bagaimana karena apa bahaya itu kan di kita itu istilahnya trigger payment free hire to fire dan unsur-unsur itu ada seberapa besar di dalam gedung itu bicara risiko ada bicara dampak kerugiannya dari Apa huniannya aktivitas huniannya itu apa seberapa banyak Nah ini kan harus ada kajian dan bahkan perhitungan teknisnya jadi sangat penting”

b. Memberikan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran

Tahapan selanjutnya adalah program pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui tatap muka, dimana program ini merupakan penerapan teori yang diaplikasikan dalam praktek. Dalam hal ini Saepuloh mengatakan bahwa:

“pertama dengan cara melaksanakan sosialisasi latihan kepada seluruh penghuni gedung ya atau perwakilan dari masing-masing lantai atau tenan ya betul isi dari latihan itu adalah yang pertama adalah bagaimana melaksanakan upaya pencegahan kebakaran seperti kewajiban untuk ketersediaannya sarana proteksi kebakaran ya kan aktif maupun pasif seperti adanya sistem Alarm Kebakaran ada Hydran Ada apar Ada system spinkler otomatis

itu selain itu juga di gedung itu harus berbentuk harus membentuk tim tanggap darurat Kalau tadi kalau tanya adalah di sisi keselamatan untuk persiapan peralatannya sarana prasarannya yang kedua itu siapkan kesiapsiagaan si penghuni dan petugas ya harus dibentuk salah satunya adalah organisasi tanggap darurat”

c. Pemeriksaan secara berkala

Untuk mengetahui apakah kondisi keselamatan kebakaran gedung eksisting dalam keadaan baik, maka pengelola gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala dengan menunjuk seorang pemeriksa teknis dan hasil pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan setiap tahunnya, tetapi apabila dipandang perlu berdasarkan laporan pemilik atau pengelola gedung Disgulkarmat dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan. Seperti yang Deni Andreas selaku Kepala Seksi Pencegahan Jakarta Selatan jelaskan.

“Semua prinsipnya fungsinya adalah sosialisasi sebenarnya Cuma karena ini dalam rangkaian dalam rangkaian pengawasan yang diatur oleh peraturan Intinya kita kan harus memberikan rekomendasi rekomendasi itu artinya apa sih rekomen memberikan input memberikan masukan proses dasarnya latar belakangnya itu ada tiga Proses dalam urusan kebakaran pertama adalah proses inspeksi outputnya Apa rekomendasi kan isinya kalau sudah diinspeksi berarti kan berarti kan secara pengamatan pemeriksaan manusia ini sudah bisa direkomendasikan nya seperti apa ya namun namanya baru observasi kan perlu uji dari uji dari hasil observasi itu biasa kita sebut nya adalah simulasi gladi. simulasi simulasi gladi outputnya apa sama kan rekomendasi juga ya itu adalah proses uji terhadap hasil inspeksi apa fungsinya dan kinerja nya setiap sistem yang ada di dalam sistem proteksi kebakaran dan sistem keselamatan kebakaran yang terakhir apa dasarnya rekomendasi adalah investigasi namun investigasi ini dilakukan ketika terjadi kebakaran kebakaran itu akan dicari penyebabnya apa ditelusuri kelemahannya apa dari sistem proteksi dan keselamatan kebakaran yang ada di gedung itu sehingga tujuan untuk apa untuk mencegah terulang kembali untuk memberikan rekomendasi tidak terjadi lagi, pembelajaran”

d. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran

Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola gedung, dimana kegiatan ini merupakan satu rangkaian dengan kegiatan sebelumnya yang sudah dijelaskan diatas. Sosialisasi ini merupakan bentuk penyampaian informasi dan edukasi kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dimana metode pelaksanaannya berupa tatap muka dengan memberikan teori dan praktek. dijelaskan oleh Edy Parwoko kepada peneliti.

“sosialisasi kan ada berbagai cara yang pertama mungkin secara tatap muka langsung dengan pisikis dengan orang dengan audiens nya masyarakat, masyarakat gedung atau masyarakat pemukiman yaitu yang secara langsung memberikan sosialisasi dan edukasi secara praktek aja ada dua ada Ada cara lain yang 1 itu dengan cara penyebaran informasi melalui pengeras suara di tempat ibadah kita lakukan di tempat ibadah jadi kadang kadang kita melakukan Hanya rekaman atau narasi voice mengingatkan bahwa penyebab kebakaran ini ini pakai pengeras suara di tempat ibadah yang ke 2 pakai mobil kendaraan atau motor daerah berkeliling-keliling memberi informasi kepada masyarakat selanjutnya melalui fisik dari melalui leaflet stiker-stiker yang kita tempel di tempat-tempat yang seperti pos keamanan yang tempat SPBU yang banyak di kunjungi orang kita tempel tempel dan menyebabkan dampak masyarakat” praktek yang dilakukan pada kegiatan ini hanya terbatas yaitu bagaimana cara penanganan awal bila terjadi kebakaran, terdapat hal lain yang lebih melibatkan banyak orang, yaitu kegiatan simulasi atau gladi penanggulangan kebakaran”

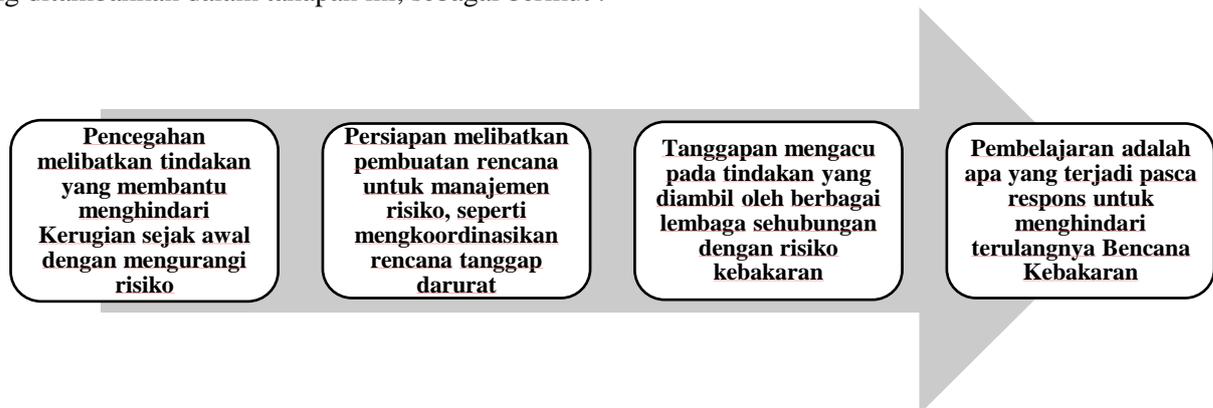
Analisis Manajemen Komunikasi Risiko Kebakaran menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Tata Kelola komunikasi risiko kebakaran menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah pemetaan suatu risiko kebakaran yang harus terkelola sesuai dengan objeknya, seperti SDM, materi, media penyampaian pesan dan khalayak sasaran. Seperti yang dijelaskan oleh Kasie Pencegahan Jakarta Selatan Deni Andreas berikut ini:

“pemahaman risiko itu bisa berbeda-beda orang sesuai dengan kapasitas pengetahuannya tentang bahaya dan resiko kebakaran cuman komunikasi ini harus dibangun berdasarkan objek-objek yang di sebagai tempat yang di analisa Kenapa bahaya dan resiko itu bergantung pada objek nya apa yang ada di dalam objek itu yang perlu diperhatikan terkait terkait analisa bahaya dan resiko isinya apa fungsinya apa huniannya bagaimana karena apa bahaya itu kan di kita itu istilahnya triger payment free hire to fire dan unsur-unsur itu ada seberapa besar di dalam gedung itu bicara risiko ada bicara dampak kerugiannya dari Apa huniannya aktivitas huniannya itu apa seberapa banyak Nah ini kan harus ada kajian dan bahkan perhitungan teknisnya jadi sangat penting”

Manajemen Komunikasi Risiko Terhadap Bencana Kebakaran Gedung

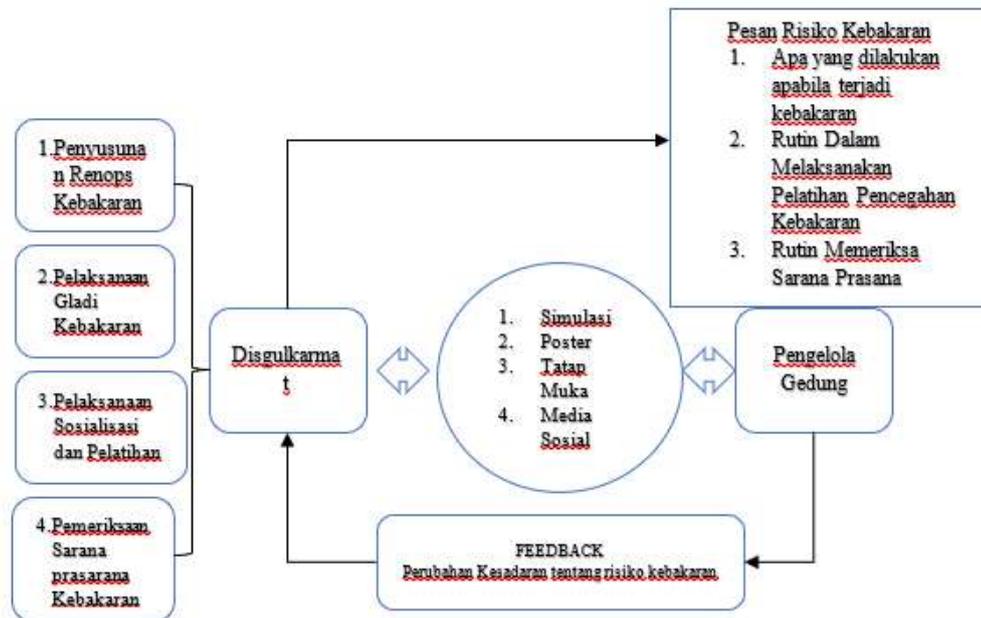
Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam pengelola risiko terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan, seperti yang disampaikan Mathew Seeger dalam (John, Foss, & Oetzel, 2017) terdapat 4 (empat) tahap dalam mengelola risiko, dalam pengelolaan risiko yang disampaikan oleh seeger merupakan risiko lebih fokus kepada bidang kesehatan tetapi dapat digunakan untuk risiko bencana khususnya kebakaran, memang terdapat muatan yang ditambahkan dalam tahapan ini, sebagai berikut :



Gambar 2 (4 tahapan dalam mengelola risiko)

Dalam tahapan ini Disgulkarmat masih melaksanakan sampai dengan tahapan tanggapan sedangkan tahapan pembelajaran masih belum dilaksanakan. Pada tahapan pembelajaran merupakan bentuk evaluasi yang seharusnya dilaksanakan setelah terjadi bencana kebakaran, hal ini merujuk kepada Peraturan Gubernur nomor 143 Tahun 2016 peran serta pengelola gedung dalam manajemen keselamatan kebakaran gedung. akan didapatkan sumber permasalahannya ketika melakukan tahapan ini dan kemungkinan terulangnya kembali menjadi kecil.

1) Komunikasi risiko terhadap kebakaran Gedung



Gambar 3 (Pesan Komunikasi Risiko)

Dalam melaksanakan komunikasi risiko terhadap kebakaran gedung ini sesuai gambar diatas bahwa pesan yang akan disampaikan harus dirancang sedemikian rupa mulai dari rencana kegiatan, stakeholder yang dituju, media yang digunakan, pesan yang akan disampaikan sampai dengan feedback yang diharapkan. Semua ini harus terencana dengan baik agar pesan dapat diterima sesuai dengan yang diharapkan.

2) Strategi Komunikasi Risiko

Dalam strategi komunikasi risiko ini yang dilakukan adalah dengan menentukan bahan kebijakan yang akan digunakan sampai dengan efek yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan dari strategi ini adalah kebijakan yang menjadi acuan agar diterapkan oleh para pengelola gedung dalam mengkomunikasikan risiko kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan di atas, manajemen komunikasi risiko terhadap bencana kebakaran dapat menjadi solusi atau strategi yang tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran gedung. beberapa catatan penting dalam kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) kebijakan yang telah ada, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 harus dilebih di komunikasikan kembali kepada pengelola gedung dalam rangka penerapan dan pelaksanaan tahapan yang ada didalamnya dan juga perlu penambahan tahapan monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat dapat berdampak positif dengan minimnya kerugian baik harta maupun jiwa bila terjadi bencana kebakaran dan Disgulkarmat perlu meleakukan terobosan kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta pengelola gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seperti: perlombaan antar gedung, pelatihan yang bersertifikasi dan lainnya. (2) strategi komunikasi risiko yang saat ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan masih sangat normatif, diperlukan masukan dari luar Dinas, seperti: akademisi, praktisi dan pengelola gedung dalam menyusun strategi yang tepat dalam melakukan manajemen komunikasi risiko ini melalui kegiatan FGD dan lain- lain. Dengan demikian diharapkan dapat dikembangkan pengelolaan komunikasi risiko kebakaran, termasuk keterlibatan komunikator, komunikasi yang efektif, pesan-pesan dan umpan balik antar pihak yang relevan untuk menciptakan makna dan pesan bersama dalam proses pengelolaan komunikasi risiko yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristyavani, I. (2022). *Komunikasi Risiko Konsep, Teori dan Strategi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Abidin, Y. Z. (2015). *Manajemen Komunikasi, Filosofi, konsep dan aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arif, M., & Lestari, S. S. (2021). *Manajemen Komunikasi Bencana Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19*. *Komunikasiana*, 01.
- Abrams, E. M., & Greenhawt, M. (2020). Risk Communication During COVID-19. *J allergy clin immunol pract*, 1791-1794.
- Adzim, H. I. (2013). *Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2009). *ILMU KOMUNIKASI Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasmawati, F. (2018). *Manajemen Dalam Komunikasi*. *Al-Idarah*, 5(6), 76–86.
- John, L., Foss, S., & Oetzel, I. (2017). *Theories Of human Communication*. -: Waveland Press, Incorporated.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan.
- Littlejohn, S. W., F. K., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication* . -: Waveland Press, Incorporated.
- Lestari, P. (2018). *Komunikasi Bencana Aspek Penting Pengurangan Risiko Bencana*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- moleong, I. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ndlela, M. N. (2019). *Crisis Communication A Stakeholder Approach*. Switzerland: Palgrave.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2014). *Study Kasus Desain dan Methode*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Zhang, L., Li, H., & Chen, K. (2020). Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China. *Healthcare*, 64.